



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT TIM
PELAKSANA EITI**

- Hari/Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana
Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
- Agenda : 1. Rencana Kerja EITI Tahun 2016
2. Pembahasan Penyelesaian Laporan EITI 2014
3. Persetujuan Laporan Perkembangan Tahunan
4. Rencana Penyusunan Road Map Beneficial Ownership
5. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan EITI 2012-2013
- Peserta Rapat
Pemerintah : 1. Kementerian Perekonomian, Deputi III: Montty Giriana, Bastian H
2. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM : Sri Raharjo, Susanna
Renna, Dedi A, Asgan Nasrullah
3. Ditjen Pajak, Kemenkeu : Ahmad Zaky Zamani, Chenris C
4. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Adijanto, Sigit
Harjanto
5. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu: Bambang R R, Ayu
Ratna Anggela
6. Ditjen Anggaran: Kemenkeu: Evi Karmilah, Seprina Hasan,
Istiyanti, Emrile P
7. BPKP: Budhi Winahyu, M Insani
8. SKK Migas: Beti Damayanti
- Asosiasi Industri dan
Perusahaan : APBI-ICMA: Supriatna Suhala
IMA : Syahrir AB
- Masyarakat Sipil : PWYP: Aryanto, Dewi Y H, Asri Nuraeni, Rizky A,
NRGI : Fikri Zaki
- Bank Dunia : Prasetya D
- Sekretariat EITI : 1. Edi Effendi Tedjakusuma
2. Ronald Tambunan
3. Agus Trianto
4. Doni Erlangga
5. Agus Prasetyono
6. Hadian
7. Anggi Gartika

A. PEMBUKAAN

Pembukaan disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana EITI, Montty Giriana : Menyampaikan bahwa EITI bisa berjalan lagi setelah adanya berbagai hambatan di tahun 2016. Tantangan yang akan dihadapi tahun 2016 salah satunya penyelesaian laporan EITI tahun 2014 yang waktunya semakin sempit. Mempersilahkan Edi Effendi dari Sekretariat EITI untuk memberikan penjelasan terkait beberapa Agenda yang akan dibahas dalam Ratimlak.

B. PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN & TANGGAPAN

Edi Effendi menyampaikan materi yang menjadi pembahasan dalam Ratimlak:

1. Rencana Kerja 2016

Edi menyampaikan bahwa tahun ini anggaran untuk pelaksanaan EITI terkena pemotongan oleh pemerintah sehingga perlu disiasati penggunaannya.

Salah satu agenda tahun ini yang harus dialokasikan anggarannya yaitu penyelesaian roadmap Beneficial Ownership (BO). Workshop tentang BO baru dilaksanakan sekali tahun ini dan diharapkan dapat dilaksanakan sekali lagi.

EITI juga berencana menyelesaikan portal data untuk mendukung pelaksanaan EITI, namun karena tak tersedianya anggaran, pembiayaan dan pengadaannya dibantu oleh Bank Dunia

Anggaran yang saat ini masih harus dipikirkan, karena terbatas yaitu seminar, terutama di luar negeri karena kehadiran Pak Montty sebagai anggota board diperlukan kehadirannya pada pertemuan EITI Internasional.

Tujuan (Objective) rencana kerja EITI:

- Peningkatan Transparansi Industri Ekstraktif
- Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif
- Meningkatnya kegiatan pembangunan industri ekstraktif melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah nasional

Tanggapan dari : Aryanto (PWYP): Agar dilaksanakan berbagai FGD untuk mendukung rencana kerja terutama tujuan ketiga yaitu Meningkatnya kegiatan pembangunan industri ekstraktif melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah nasional.

2. Penyusunan Laporan EITI 2014

Indonesia dituntut dapat menyelesaikan Laporan EITI 2014 sebelum berakhirnya tahun 2016.

Karena berbagai permasalahan, terutama masalah anggaran, proses lelang Independent Administrator (IA) baru bisa dimulai akhir Juni 2016 dengan membuka pengumuman lelang, dan kemudian dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penyedia jasa.

Terdapat 6 perusahaan yang telah memasukkan dokumen dan dievaluasi lagi menjadi 4 perusahaan yang memenuhi syarat.

Shortlist sudah ditetapkan dengan dan dikirimkan NOL ke Bank Dunia tanggal 8 Agustus 2016, dengan shortlist : KAP Osman Bing Satrio & Eny (deloitte), KAP Sukrisno Sarwoko & Sandjaja, KAP Ernst & Young Indonesia, dan KAP Bayu Susilo.

Bank Dunia mengeluarkan NOL pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan mengubah metode FBS menjadi Selection Based on Consultant's Qualification (CQS), yang berarti KAP Deloitte yang hanya mengirimkan Proposal Teknis dan Biaya, dan dapat dilanjutkan dengan kontrak;

Tanggal 18 Agustus 2016, dikirimkan jawaban surat ke Bank Dunia, bahwa metode tetap FBS sesuai kesepakatan, dengan 4 perusahaan yang akan mengirimkan proposal teknis dan biaya. Kemenko Bidang Perekonomian tak setuju kalau ada perubahan metode lelang karena telah disepakati sebelumnya.

Proses sangat panjang sehingga kemungkinan didapatkan pemenang paling cepat tanggal 29 september untuk dikontrak tanggal 30 September 2016.

Solusi untuk mempercepat penyelesaian laporan adalah sebelum ada pemenang lelang, Sekretariat EITI telah terlebih dahulu mengirimkan format template ke perusahaan minerba dan migas, karena

pengumpulan data sangatlah krusial. Walaupun bank Dunia masih belum sepatat karena ditakutkan adanya perubahan template.

Tanggapan:

Sri Raharjo, Ditjen Minerba menyetujui pengiriman template terlebih dahulu, dan nama perusahaan didiskusikan dulu, harus yang CNC karena banyak yang IUP. Template yang dikirimkan juga bukan template kosong namun tinggal update template sebelumnya.

Aryanto (PWYP): setuju, tapi sebelumnya harus didiskusikan dulu untuk mengantisipasi adanya permasalahan.

Zacky Ditjen Pajak setuju sehingga harus dikumpulkan dulu materinya dan update dari tahun lalu karena telah ada record.

Edi (Sekretariat EITI): Kalau ada perusahaan yang belum CNC nanti didiskusikan lagi, atau bisa diganti perusahaan di bawahnya.

3. Persetujuan Laporan Perkembangan (*Progress Report*) 2015

Laporan Perkembangan tahunan seharusnya dipublish pada bulan Juli tahun berikutnya. Apabila sampai akhir tahun tidak dilaporkan ke EITI Internasional negara yang bersangkutan akan terkena suspensi.

Draft laporan telah disebarakan ke seluruh anggota Tim Pelaksana dan telah mendapatkan tanggapan dari SKK Migas dan CSO.

Ketua Tim Pelaksana EITI menyarankan laporan sebaiknya dilengkapi dengan daftar isi.

Pada dasarnya semua menyetujui namun dimungkinkan adanya tanggapan dan masukan paling lambat tanggal 31 Agustus 2016.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan EITI 2012-2013

Tindak lanjut rekomendasi tentang Informasi tentang koordinat wilayah kerja, Informasi peserta tender, Informasi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial ownership*) wilayah kerja migas, Akses publik pada isi kontrak kerjasama migas masih belum ada jawaban karena Ditjen Migas tak hadir dalam Ratimlak.

Tindak lanjut Rekomendasi untuk Ditjen Minerba:

- Akses publik pada informasi kadaster: Informasi kadaster bisa diakses publik namun sebagai tamu dan belum semua informasi yang bisa diakses.
- Akses publik untuk PKP2B: masih belum bisa dibuka dan masih dibahas di Mahkamah Konstitusi
- Tanggapan tentang rekomendasi lainnya akan dijawab kemudian lewat email

Tindak lanjut Rekomendasi untuk SKK Migas:

- Pembukaan Kontrak: PSC/Kontrak Kerja Sama bukan informasi publik yang dapat diakses seluruh pihak. SKK Migas dapat menyediakan informasi DRAFT PSC yang memuat ketentuan dalam PSC.
- Rekomendasi standardisasi conversion rate volume gas: Dalam template yang baru, KKKS akan mengisi data sesuai dengan kebutuhan EITI report

Tanggapan:

Sri Raharjo, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM : Ijin yang dikeluarkan gubernur, Bupati, walikota terkait diluar kewenangan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM hanya bisa membantu sosialisasi sampai ke daerah. Kementerian ESDM bisa membantu untuk perusahaan

yang sudah cnc, tapi untuk non cnc tidak bisa bisa karena kewenangan gubernur atau bupati. IUP sulit sekali ditindaklanjuti, oleh ditjen minerba karena adanya UU 23/2014.

Supriatna Suhala (APBI): Harus ada peningkatan komunikasi antara pusat dengan gubernur/provinsi. Karena yang hadir biasanya kurang mewakili.

Syahrir AB IMA: Semua karena implikasi otonomi daerah. IMA ingin mengangkat (amandemen) Ditjen Minerba lebih sebagai pusat pengelolaan dan daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Namun kenyataan di lapangan Permen tidak dianggap karena ada Perda.

Adijanto Ditjen Perbendaharaan: Ketidak jelasan peraturan menyebabkan PNPB tidak masuk dan DBH tidak jelas. Hal ini menyebabkan protes dari Pemda walaupun DBH telah diatur dengan UU.

Sri Raharjo: wacana sanksi Pemda apabila DBH dikurangi, namun mereka bersikeras DBH adalah hak mereka.

Adijanto: KPK telah melakukan roadshow untuk menindak penyimpangan IUP, termasuk yg di daerah.

Tindak lanjut Rekomendasi untuk Ditjen pajak

Ketentuan pasal 34 UU Pajak yang menyebabkan lamanya proses rekonsiliasi data pajak perusahaan pelapor. Jalan keluarnya yaitu Ketua Timlak atau Tim Pengarah mengirim surat ke Menkeu agar memberi izin tertulis kepada dirjen pajak untuk membuka data pph perusahaan pelapor. Kalau Menkeu sudah memberikan ijin, langsung dibuka.

Tindak lanjut Rekomendasi untuk Tim Pelaksana

Batas materialitas untuk kelancaran dan penentuan prioritas penelusuran perbedaan (*discrepancies*) 5% sesuai ketentuan pengungkapan laporan yg disyaratkan OJK.

Tanggapan:

Syahrir AB: Setuju sesuai OJK

Evi karmilah Ditjen Anggaran: Tugas IA adalah sampe 0%, kalau *discrepancies* sampai 5% masih wajar, tapi jangan ditentukan di awal.

BPKP: item per item dari jenis *discrepancies*. 5% toleransi atau tidak tergantung judgment di post masing2. Misal, kalau *discrepancies* di migas sangat besar.

Perbedaan sistem pembayaran SAU dan SAI

Susanna Renna: sudah dilakukan sosialisasi dan diklat untuk pembayaran PNPB. Di Ditjen Minerba juga ada direktorat baru, yaitu Direktorat Penerimaan Minerba.

Adijanto: PNPB di hilir yang akan dibagihasikan, apabila terdapat perbedaan SAU dan SAI membuat perbedaan.

Istiyanti Ditjen Anggaran: telah ada solusi perbedaan tersebut yaitu penggunaan sistem PNPB online. Ditjen anggaran telah menggunakan aplikasi Simponi. Pemasukan data tidak manual, harus input detail data, berat peritem, jenis. Data pembayaran bisa dipantau realtime dan ada kode admin untuk memantau pembayaran. Ditjen anggaran mendorong Ditjen Minerba menggunakan Simponi. Mulai 1 agustus telah menggunakan sistem baru, sehingga tidak ada kesalahan, terutama perusahaan yang sudah self assesment.

Adijanto: daerah-daerah banyak yang pembayaran lewat kantor pos/manual, harus juga menggunakan online/simponi.

Aryanto: Sebaiknya ditulis artikel tentang succes stories (tentang simponi di Ditjen anggaran).

5. Pembahasan Roadmap Beneficial Ownership (BO)

Tujuan:

- Menghasilkan roadmap BO industri ekstraktif di Indonesia yang berguna sebagai referensi para pihak dalam menyusun dan mensinkronkan kegiatan masing-masing sehingga nantinya dapat diperoleh informasi BO industri ekstraktif yang berguna untuk meningkatkan kinerja industri ekstraktif nasional
- Menginventarisir dan mensinkronkankan pandangan para pihak tentang pentingnya informasi BO industri ekstraktif bagi kinerja penerimaan negara dan pembangunan Indonesia
- Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan roadmap sehingga dapat diantisipasi langkah-langkah untuk mencari jalan keluar
- Mengidentifikasi kerangka hukum dan kelembagaan yang diperlukan bagi pelaksanaan roadmap sehingga informasi BO dapat diperoleh dengan lebih mudah secara tersistim

Tahun ini roadmap BO harius dapat diselesaikan dan tahun 2020 diharapkan tak ada lagi hambatan dalam kerangka hukum, jadi harus bisa diidentifikasi di roadmap.

Pembuatan roadmap bisa menggunakan jasa konsultan namun sayangnya EITI tak memiliki dana.

Rencana kerja untuk penyelesaian roadmap telah disusun (lihat presentasi) dengan setidaknya 2 kali diskusi lagi.

Tanggapan

Aryanto: Bisa kontak Bappenas untuk kerjasama karena telah ada pertemuan dengan KPK dan PPATK membahas tentang BO walaupun tak spesifik industri ekstraktif.

Adijanto: Seluruh langkah EITI harus melaporkan pada Kemenko Perekonomian karena walaupun independen namun tetap mewakili nama Indonesia.

6. Rencana Impact Assessment

Ada rencana pelaksanaan Impact Assessment dilaksanakan dengan dana dari Bank Dunia. Semua setuju.

C. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

Hal yang telah disepakati :

1. Agar rencana kerja lebih efektif karena adanya pemotongan anggaran EITI pada tahun 2016.
2. Pengiriman template untuk Laporan EITI 2014 ke perusahaan dapat dilakukan sebelum terpilihnya IA karena terbatasnya waktu penyelesaian Laporan EITI 2014.
3. Persetujuan Laporan Perkembangan (*Progress Report*) 2015 dengan masukan atau tanggapan ditunggu hingga 31 Agustus 2016.
4. Tindaklanjut rekomendasi EITI yang belum mendapatkan tanggapan akan diberikan secara tertulis.
5. Akan dilaksanakan berbagai kegiatan untuk penyelesaian Roadmap BO.
6. Persetujuan pelaksanaan Impact Assessment apabila dibiayai Bank Dunia.

